

## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI MASYARAKAT RIMBA JAYA MERAUKE SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS

Anugerah Mulia Utami<sup>1)</sup>, Nurul Uswatun Hasanah<sup>2)</sup>

<sup>1), 2)</sup> Universitas Musamus

E-Mail:

[anugerahmuliautami@unmus.ac.id](mailto:anugerahmuliautami@unmus.ac.id)<sup>1)</sup>, [nuruluswatunhasanah@unmus.ac.id](mailto:nuruluswatunhasanah@unmus.ac.id)<sup>2)</sup>

**Submitted:**

26-06-2025

**Accepted:**

17-07-2025

**Published:**

18-07-2025

### ABSTRAK

Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, tentang nilai-nilai dasar anti korupsi. Pelaksanaan kegiatan pada Juni 2025 melibatkan metode sosialisasi, diskusi partisipatif, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk korupsi dan strategi pencegahan sederhana di lingkungan keluarga dan komunitas. Program ini diharapkan mampu menjadi langkah awal membangun budaya integritas di tingkat lokal. Pengabdian kepada masyarakat berupa pendidikan anti korupsi di Rimba Jaya, Merauke perlu dilaksanakan karena masih rendahnya akses masyarakat terhadap informasi dan pemahaman tentang bahaya serta dampak korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penguatan nilai-nilai integritas dan kejujuran di tingkat lokal sangat penting untuk mencegah praktik-praktik koruptif yang dapat muncul dalam tata kelola pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat.

**Kata kunci:** Pendidikan Anti Korupsi; Budaya Integritas, Pemberdayaan Masyarakat

### ABSTRACT

*This community service program aims to increase community understanding and awareness of the core values of anti-corruption in Rimba Jaya Village, Merauke. The program, implemented in June 2025, involved outreach, participatory discussions, and case simulations. Results showed an increase in participants' understanding of the forms of corruption and simple prevention strategies within the family and community. This program is expected to be the first step in building a culture of integrity at the local level. Community service in the form of anti-corruption education in Rimba Jaya, Merauke is essential due to the limited public access to information and understanding about the dangers and impact of corruption in daily life. Furthermore, strengthening values of integrity and honesty at the local level is crucial to prevent corrupt practices in both governance and community life.*

**Keywords:** *Anti-Corruption Education; Culture of Integrity; Community Empowerment*

**Corresponding**

**Author:**

Anugerah Mulia  
Utami

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang menghambat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif seperti penindakan hukum, tetapi juga harus dilengkapi dengan pendekatan preventif melalui Pendidikan (Marzuki, 2024; Simarmata & Yusuf, 2024). Pendidikan antikorupsi

(PAK) menjadi strategi jangka panjang yang diyakini dapat menumbuhkan budaya antikorupsi sejak usia dini dan membentuk karakter generasi bangsa yang berintegritas (Hasan et al., 2024).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berupaya mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui berbagai program, salah satunya adalah Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan). SPI Pendidikan mengukur tiga aspek utama, yaitu karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola satuan pendidikan. Hasil survei nasional pada tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks integritas pendidikan nasional masih berada di angka 70,4 yang termasuk kategori “rentan”. Sementara itu, SPI Pendidikan 2024 menunjukkan hasil yang lebih rendah, yaitu 69,50, dan masih berada dalam kategori “korektif”. Temuan ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menanamkan nilai integritas secara efektif (Jendela Kemdikbud, 2024; KPK, 2025).

Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian khusus, terlebih di daerah-daerah dengan keterbatasan akses pendidikan seperti Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di daerah ini, hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi antara lain adalah minimnya infrastruktur pendidikan, kurangnya pelatihan guru tentang nilai-nilai integritas, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan digital. Dalam konteks seperti ini, pendekatan pendidikan antikorupsi tidak bisa dilakukan secara linier, melainkan harus dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat (Subkhan, 2020).

Pendidikan antikorupsi di Rimba Jaya dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kajian empiris menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn berkontribusi positif dalam membentuk pemahaman siswa tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial (Ikrom et al., 2024). Materi PPKn juga dapat menjadi wadah reflektif bagi siswa untuk menganalisis persoalan korupsi yang terjadi di lingkungan mereka, serta mengembangkan sikap kritis dan solutif terhadap masalah sosial tersebut (Hasan, 2025).

Selain melalui mata pelajaran formal, pendidikan antikorupsi juga perlu dilakukan dengan metode yang lebih partisipatif. Pendekatan berbasis pengalaman atau experiential learning telah terbukti efektif dalam membentuk karakter siswa. Misalnya, melalui diskusi kelompok, simulasi sidang, penulisan esai, atau proyek sosial yang mendorong siswa untuk menyelidiki dan memahami praktik korupsi di lingkungan sekitar. Pendekatan ini memungkinkan siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui keterlibatan emosional dan sosial (Halimah et al., 2021; Hasan, 2025; Siregar, 2024).

Pendekatan pedagogi kritis juga sangat relevan diterapkan dalam pendidikan antikorupsi di Rimba Jaya. Menurut Subkhan (2020), pedagogi kritis mendorong siswa untuk berpikir reflektif terhadap struktur sosial yang korup dan ketidakadilan di sekitar mereka. Melalui proses ini, siswa tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga menjadi subjek perubahan sosial yang aktif. Dalam konteks Rimba Jaya, pendekatan ini dapat melibatkan siswa dalam mengkritisi kebijakan lokal, praktik birokrasi sekolah, atau tata kelola anggaran di tingkat komunitas.

Pelibatan komunitas juga menjadi aspek penting dalam pendidikan antikorupsi. Masyarakat Rimba Jaya yang memiliki struktur adat dan nilai budaya lokal yang kuat dapat menjadi mitra penting dalam pembentukan nilai integritas. Studi oleh Monita et al., (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua, tokoh adat, dan pemuka agama dalam program pendidikan antikorupsi secara signifikan meningkatkan pemahaman dan sikap antikorupsi di kalangan pelajar. Pendidikan tidak boleh berhenti di ruang kelas, tetapi harus meresap ke dalam ruang-ruang sosial masyarakat.

Salah satu strategi nasional yang telah diinisiasi oleh KPK adalah pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API). Program ini bertujuan untuk mencetak agen-agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat secara langsung mengenai bahaya korupsi dan cara mencegahnya. Di daerah seperti Rimba Jaya, kehadiran penyuluh lokal sangat penting untuk menjangkau masyarakat yang belum terakses oleh kampanye nasional (ACLC, 2022). Namun, tantangan masih sangat besar. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pelatihan guru dan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan antikorupsi. Banyak guru yang belum memahami metode dan pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai integritas dalam pembelajaran. Selain itu, praktik-praktik yang mencerminkan ketidakjujuran seperti pungutan liar di sekolah atau nepotisme dalam pengelolaan dana sekolah dapat menjadi kontraproduktif terhadap nilai-nilai yang diajarkan (Ahmad, 2025; Salsabila et al., 2024). Lebih jauh lagi, sistem penilaian yang hanya menekankan pada aspek kognitif perlu diperluas ke aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan antikorupsi tidak hanya bertujuan membentuk siswa yang “tahu” bahwa korupsi itu salah, tetapi juga membentuk siswa yang “peduli” dan “mau bertindak” mencegahnya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi pendekatan pendidikan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Sebagai solusi, Rimba Jaya dapat menjadi laboratorium sosial untuk pengembangan model pendidikan antikorupsi berbasis komunitas. Model ini tidak hanya mengandalkan kurikulum sekolah, tetapi juga mendorong sinergi antara sekolah, keluarga, tokoh adat, pemerintah lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Program seperti kampanye budaya jujur, forum diskusi warga, pementasan seni dengan pesan antikorupsi, hingga pelatihan keterampilan sosial dapat memperluas jangkauan nilai-nilai integritas ke seluruh lapisan masyarakat (Zhafarina & Bantam, 2020).

Dengan model kolaboratif tersebut, diharapkan Rimba Jaya dapat melahirkan generasi muda yang memiliki integritas tinggi dan menjadi agen perubahan bagi masa depan Merauke dan Indonesia secara lebih luas. Pendidikan antikorupsi bukan sekadar materi pelajaran, melainkan proses transformasi sosial yang berkelanjutan. Rimba Jaya, sebuah kelurahan di Kabupaten Merauke, merupakan wilayah yang cukup strategis namun belum tersentuh oleh program sosialisasi pendidikan anti korupsi secara masif. Minimnya edukasi anti korupsi di tingkat masyarakat akar rumput membuka peluang terjadinya praktik korupsi yang tidak disadari sebagai tindakan melanggar hukum dan moral. Selain itu, adanya anggapan masyarakat bahwa praktik seperti pemberian “uang rokok” atau “hadiah terima kasih” kepada pejabat merupakan hal biasa menunjukkan perlunya edukasi mendalam mengenai definisi dan dampak korupsi. Sebagai langkah preventif, pendidikan anti korupsi perlu dirancang secara kontekstual sesuai dengan latar belakang sosial budaya masyarakat. Hal ini bertujuan agar pesan anti korupsi dapat diterima dan diinternalisasi secara lebih efektif. Rimba Jaya, sebuah kelurahan di Kabupaten Merauke, merupakan wilayah yang cukup strategis namun belum tersentuh oleh program sosialisasi pendidikan anti korupsi secara masif. Minimnya edukasi anti korupsi di tingkat masyarakat akar rumput membuka peluang terjadinya praktik korupsi yang tidak disadari sebagai tindakan melanggar hukum dan moral.

Oleh karena itu, pengabdian ini diinisiasi untuk menyampaikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat Rimba Jaya dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual. Melalui program ini diharapkan dapat terbentuk budaya integritas yang berakar dari kesadaran masyarakat itu sendiri.

## **METODE**

Program pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di Balai Pertemuan Rimba Jaya, Merauke. Peserta program terdiri atas 75 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pemuda, dan perangkat RT/RW. Kegiatan ini

dirancang dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), yang mengutamakan partisipasi aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan (Dewi et al., 2025; Suarman & Mulawarman, 2024).

Kegiatan ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. **Sosialisasi Interaktif**

- Penyampaian materi mengenai pengertian, jenis-jenis, penyebab, dan dampak korupsi.
- Penggunaan media visual seperti video edukasi, infografis, dan studi kasus lokal untuk mempermudah pemahaman.
- Narasi materi disampaikan dengan bahasa sederhana dan relevan dengan keseharian masyarakat.

2. **Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)**

- Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan pengalaman nyata terkait korupsi sehari-hari.
- Diskusi difasilitasi oleh tim pengabdian untuk menggali sudut pandang masyarakat.
- Hasil diskusi dirangkum sebagai bahan evaluasi bersama.

3. **Simulasi Kasus**

- Roleplay tentang cara menolak permintaan pungli atau gratifikasi.
- Peserta diberi kesempatan mempraktikkan secara langsung berbagai skenario yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

4. **Evaluasi Pre dan Post-Test**

- Pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan menggunakan instrumen kuantitatif.
- Digunakan sebagai indikator keberhasilan program.

5. **Penyusunan Komitmen Bersama**

- Di akhir sesi, peserta menyusun deklarasi komitmen anti korupsi tingkat komunitas.
- Komitmen ini dirumuskan secara partisipatif dan disahkan dalam bentuk dokumentasi tertulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat

Antusiasme masyarakat Rimba Jaya cukup tinggi. Dari 100 undangan, 75 orang hadir secara aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Sebagian besar peserta menunjukkan keterbukaan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Keterlibatan peserta dalam diskusi kelompok menunjukkan bahwa isu korupsi dianggap relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

2. Peningkatan Pemahaman

Berdasarkan hasil evaluasi pre-test, hanya 32% peserta yang memahami secara benar mengenai korupsi. Setelah dilakukan sosialisasi, diskusi, dan simulasi, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman hingga 81%. Ini menunjukkan bahwa metode penyampaian berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta terhadap isu korupsi.

3. Temuan Diskusi

Beberapa temuan menarik dari diskusi kelompok antara lain: - Gratifikasi dalam bentuk pemberian hasil kebun kepada aparat dianggap sebagai budaya. - Tindakan pungli pada pengurusan administrasi warga masih dianggap lumrah. - Peserta belum memahami adanya jalur pengaduan resmi terkait praktik korupsi di lingkup RT/RW. - Adanya rasa takut dan enggan melaporkan praktik korupsi karena khawatir terjadi konflik sosial.

4. Komitmen Bersama

Sebagai tindak lanjut, masyarakat menyepakati beberapa komitmen antara lain: - Menolak segala bentuk pungutan liar. - Mengedukasi anggota keluarga terkait pentingnya nilai kejujuran. - Melaporkan indikasi korupsi kepada pihak berwenang. - Membentuk kelompok kerja kecil di tingkat RT/RW sebagai forum diskusi dan kontrol sosial.

5. Dampak Jangka Pendek dan Rencana Tindak Lanjut

Program ini memberikan dampak berupa: - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bentuk dan dampak korupsi. - Terciptanya ruang diskusi baru antar warga terkait praktik kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. - Didorongnya rencana pembentukan komunitas integritas di lingkungan Rimba Jaya sebagai tindak lanjut dari deklarasi komitmen



**Gambar 1.** Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Masyarakat Rimba Jaya, Merauke

## KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi melalui program pengabdian kepada masyarakat Rimba Jaya Merauke telah berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen kolektif masyarakat dalam mencegah dan melawan korupsi di lingkup komunitas. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya integritas dari tingkat lokal.

Untuk keberlanjutan program, direkomendasikan: - Pelibatan instansi terkait dalam pendampingan masyarakat secara berkelanjutan. - Penguatan jalur komunikasi warga dengan lembaga pengaduan resmi seperti Ombudsman atau KPK. - Pengembangan materi pendidikan anti korupsi berbasis lokal dengan bahasa dan contoh yang relevan dengan keseharian masyarakat Rimba Jaya. - Evaluasi periodik untuk memonitor sejauh mana deklarasi komitmen bersama diimplementasikan dalam kehidupan nyata masyarakat.

Dengan strategi tersebut, diharapkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan anti korupsi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun Indonesia yang lebih bersih dan bermartabat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke, perangkat Kelurahan Rimba Jaya, dan seluruh peserta kegiatan yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program ini.

## REFERENSI

- ACLC (2022). *Tata Cara dan Persyaratan Menjadi Ahli Pembangun Integritas (API)*. Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220822-tata-cara-dan-persyaratan-menjadi-ahli-pembangun-integritas-api>
- Ahmad, T. S. (2025). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Merdeka (Studi Dinas Pendidikan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Dewi, K. S. Y. K., Jati, L. J., Febriyanti, P. N., & Jemali, M. F. O. (2025). Pengembangan Pelayanan, Promosi, Dan Pemasaran Digital Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dan Penjualan NTB Mall. *JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 2(2), 13-19.
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah Pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1-14.
- Hasan, R. (2025). Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(1), 44-53.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Ikrom, F. D., Maftuhah, S., Maharani, L., & Marnah. (2024, July 20). Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi generasi anak bangsa. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7).
- Jendela Kemdikbud (2024). *Pentingnya Indeks Integritas UN untuk Dorong Perilaku Jujur*. Sumber: [https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/pentingnya-indeks-integritas-un-untuk-dorong-perilaku-jujur#:~:text=Indeks%20Integritas%20Ujian%20Nasional%20\(IIUN,menggambarkan%20tingkat%20kejujuran%20pelaksanaan%20UN](https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/pentingnya-indeks-integritas-un-untuk-dorong-perilaku-jujur#:~:text=Indeks%20Integritas%20Ujian%20Nasional%20(IIUN,menggambarkan%20tingkat%20kejujuran%20pelaksanaan%20UN).
- KPK (2025). *Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024*. Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/pengumuman/pengumuman-lainnya/survei-penilaian-integritas-spi-pendidikan-2024>
- Marzuki, I. (2024). Korupsi sebagai Kejahatan Serius: Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi. *Policy and Law Journal*, 1(1), 16-26.
- Monita, Y., Yahya, T., & Sasmiar, S. (2023). Peningkatan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 95-103.
- Salsabila, A. P., Sumomba, D. S., Islami, M. F., Al Fadil, M., Triadi, B., Pratama, H., & Azaliyyah, A. (2024). Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Generasi Muda. *Journal of Marginal Social Research*, 1(2), 29-38.
- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5187-5202.
- Siregar, M. (2024). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SD. *Analysis*, 2(2), 276-284.

- Suarman, S., & Mulawarman, L. (2024). Edukasi Manajemen Bisnis Guna Mengoptimalkan Pengelolaan Bumdes di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. *JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 1(1), 1-8.
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 15-30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649> Jurnal KPK+1Jurnal KPK+1
- Zhafarina, A. N., & Bantam, D. J. (2020). Pendidikan antikorupsi sebagai kebijakan non penal dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1).